



Judul : Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership - DPR Bertekad Jaga Kedaulatan di Kawasan Pasifik
Tanggal : Selasa, 24 Juli 2018
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 4

INDONESIA-PACIFIC PARLIAMENTARY PARTNERSHIP

DPR Bertekad Jaga Kedaulatan di Kawasan Pasifik

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bertekad menjaga kedaulatan di kawasan Pasifik. Upaya tersebut dilakukan salah satunya dengan ikut aktif dalam kegiatan Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP).

IPPP merupakan sinergitas antara DPR dan pemerintah untuk ikut serta dalam menjaga keamanan, pembangunan ekonomi, dan konektivitas kawasan Pasifik. IPP dinilai sangat strategis sebagai forum komunikasi dengan berbagai negara-negara tetangga. Apalagi secara geografis, Indonesia terletak di kawasan rawan yakni di tengah Samudra Hindia-Samudra Pasifik, serta di antara Benua Asia dan Australia.

"Karena kita ditakdirkan berada di laut yang sama. Untuk itulah, kami menyadari perlunya mengembangkan hubungan lebih jauh dan langsung terutama melalui parlemen," ujar Ketua DPR Bambang Soesatyo di Jakarta kemarin.

Dia mengatakan DPR menyadari pentingnya parlemen dalam jalur diplomasi. Menurutnya, parlemen berperan menjembatani dan menyalurkan aspirasi rakyat di panggung internasional serta forum diplomasi internasional. Karena itu, Indonesia dan negara Pasifik perlu membentuk suatu kemitraan untuk bersama-sama menghadapi tantangan ke depan. "Realitas menunjukkan bahwa negara-negara di kawasan Pasifik ini tidak hanya dipersatukan oleh kesamaan kondisi geografis, potensi kekayaan alam dan keberagaman latar belakang sumber daya manusianya, termasuk ras, tetapi juga kesamaan dalam tantangan dan masalah yang dihadapinya," ungkapnya.

IPPP akan mengangkat isu pembangunan di bidang kelautan, kemaritiman, dan pembangunan sumber daya manusia (SDM) menjadi fokus bersama Indonesia dan negara-negara yang berada di Kawasan Pasifik.

"
Karena kita di-
takdirkan berada di
laut yang sama.
Untuk itulah, kami
menyadari perlunya
mengembangkan
hubungan lebih jauh
dan langsung
terutama melalui
parlemen.

BAMBANG SOESATYO
Ketua DPR

Ketua Tim Diplomasi Parlemen Indonesia yang juga Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai IPPP merupakan sebuah terobosan penting. Mengingat negara-negara Pasifik umumnya menganut sistem parlementer, tentu diplomasi parlemen perlu mengambil peranan penting di dalamnya. "Indonesia menganggap negara-negara Pasifik sebagai mitra penting, bukan hanya karena kedekatan geografis, tetapi juga dalam hal potensi yang dimiliki bersama untuk pembangunan berkelanjutan," katanya.

Fadli mengungkapkan, dari 14 negara yang hadir, semua negara sepakat lautan tak seharusnya dijadikan tembok pemisah, melainkan seharusnya dijadikan alat pemersatu. "Indonesia, bersama dengan tetangga-tetangganya di Pasifik;

merupakan satu benua biru, sebuah benua maritim. Itu sebabnya tema pembangunan manusia dan maritim dijadikan tema IPPP. Bagaimanapun, perekonomian Indonesia dan negara-negara Pasifik memang sangat terikat dan tergantung pada 'Blue Economy'," ucapnya dalam agenda yang sama.

Sebagai negara kepulauan, sambungnya, Indonesia dan negara-negara Pasifik memiliki potensi ekonomi dan sumber daya laut yang tak tertandingi. Namun, potensi tersebut juga datang dengan tantangan, seperti perubahan iklim, naiknya permukaan air laut, meningkatnya limbah plastik, yang semuanya perlu diatasi. "Semua negara Pasifik yang hadir berpandangan masalah-masalah tadi akan lebih mudah diatasi jika ada kemitraan di kawasan," ungkapnya.

Hal senada diungkapkan Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla yang mengatakan negara-negara Pasifik tidak bisa mengatasi tantangan pembangunan manusia dan maritim berkelanjutan jika berdiri sendiri, sebab itu dibutuhkan hubungan kemitraan yang kuat dan berkelanjutan.

"Sama seperti arti Pasifik yang berarti teduh, diharapkan kemitraan ini dapat memberikan kedamaian dan ketenangan bersama untuk membangun Kawasan Pasifik lebih maju," ucapnya.

JK menilai banyak orang yang mengartikan laut memisahkan kita. Padahal, Pasifik menghubungkan kita satu sama lain. "Karena itu masalah yang terjadi di Pasifik, adalah masalah di negara Pasifik lainnya," tegasnya.

● mula akmal